

RANCANGAN KESEPAKATAN

**RAPAT KOORDINASI TEKNIS
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2007
SURABAYA, 28 – 31 MEI 2007**

DASAR KESEPAKATAN

- UU KESEHATAN NO.23 TH 1992
- UU DESENTRALISASI DAN OTODA NO.22 TH 1999
- SK MENKES NO. 932 TH 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN SIKDA
- SK MENKES 1457 TENTANG KW-SPM
- KEP. MENKES NO.131/MENKES/SK/II/04 TTG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
- KEP. MENKES NO.128/MENKES/SK/II/04 TTG KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
- ARAHAN DIRJEN BINA KESMAS DLM RAKONTEK SIMPUS 2007
- PENGALAMAN LAPANGAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS (PURWOREJO, NGAWI, TLG.AGUNG, JEMBRANA DAN PAYAKUMBUH)

KESEPAKATAN UMUM¹

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS DIPERKENALKAN DENGAN NAMA “SIMPUS”

DI DALAM PENYELENGGARAANNYA, SIMPUS DI DUKUNG DENGAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS YANG TELAH DIKENAL DAN CUKUP FAMILIAR DIKALANGAN PETUGAS KESEHATAN YANG BEKERJA DI PUSKESMAS .

Oleh karena itu didalam pembangunan sistem informasi manajemen Puskesmas perlu memanfaatkan dan meninjau kembali instrumen dan mekanisme yang telah ada dan dikenal

KESEPAKATAN UMUM²

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS MELEKAT PADA MANAJEMEN PUSKESMAS

Sebesar apapun Puskesmas, adalah sebuah organisasi yang didalam penyelenggaraannya harus menerapkan fungsi manajemen yang memerlukan dukungan sistem informasi.

Oleh karena itu setiap pengelola Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem Informasi yang handal, dinamis dan berkesinambungan

KESEPAKATAN UMUM^{3A}

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS MERUPAKAN SUB SISTEM DARI SIK KABUPATEN / KOTA

Puskesmas adalah UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten dengan demikian manajemen di puskesmas tidak terpisahkan dengan manajemen di Dinas kesehatan Kabupaten / Kota

KESEPAKATAN UMUM^{3B}

***SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN
KABUPATEN / KOTA MERUPAKAN SUB SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN KABUPATEN / KOTA***

***DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTA ADALAH UNIT KERJA
DIBAWAH KENDALI DAN TANGGUNG JAWAB BUPATI***

KESEPAKATAN UMUM⁴

**DIBANGUN KOMITMEN INTERNAL JAJARAN
DEPKES RI TERMASUK DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTA DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS.**

**PENYELENGGARAAN SIMPUS MEMERLUKAN PERSAMAAN
LANGKAH DAN POLA PIKIR DARI APARAT DI JAJARAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN / KOTA**

KESEPAKATAN UMUM⁵

**PERLU DUKUNGAN KESINAMBUNGAN
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DARI
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

**SISTEM INFORMASI HARUS BEKERJA DENGAN BAIK PADA
SETIAP MANAJEMEN PUSKESMAS BERPROSES**

**OLEH KARENA ITU HARUS ADA PENGORGANISASIAN YANG
JELAS YANG DI DUKUNG OLEH TENAGA YANG MEMILIKI
KOMPETENSI DAN DI BIYAI MELALUI SUMBER PEMBIAYAAN
YANG MENJAMIN KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN
SISTEM**

KESEPAKATAN UMUM⁶

**MENATA KEMBALI SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
DENGAN MEMANFAATKAN DAN MENINJAU KEMBALI
INSTRUMEN YANG TELAH ADA**

**Pada umumnya sebagian besar instrumen SP2TP
masih di gunakan di tingkat pelaksana (Puskesmas)**

**Oleh karenanya pembangunan / pengembangan
simpus dapat meninjau kembali dan memanfaatkan
instrumen beserta mekanismenya**

KESEPAKATAN UMUM⁷

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DIDASARKAN ATAS KELAYAKAN POTENSI SUMBER DAYA DAN TINGKAT KESULITAN PUSKESMAS.

kapasitas potensi sumber daya, tingkat kesulitan dan kebutuhan informasi antar daerah cukup bervariasi.

Oleh karena itu setiap pembangunan sistem harus diawali dengan kegiatan analisis sistem dengan tujuan untuk menentukan kelayakan sistem

KESEPAKATAN UMUM⁸

LUARAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS HARUS BERMANFAAT BAGI PENGELOLA PUSKESMAS PADA SETIAP JENJANG ADMINISTRASI KESEHATAN

TYPE FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS ADALAH TRANSAKSIONAL SEHINGGA PUSKESMAS MEMERLUKAN INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM SECARA MAKSIMAL

TYPE FUNGSI MANAJEMEN KABUPATEN / KOTA ADALAH STRATEGI OPERASIONAL SEHINGGA PUSKESMAS MEMERLUKAN INFORMASI TENTANG MASALAH KESEHATAN MENURUT WAKTU DAN LOKASI AGAR CAKUPAN KEGIATAN PROGRAM DAPAT MAKSIMAL, EFEKTIF DAN EFISIEN

TYPE FUNGSI MANAJEMEN PROPINSI ADALAH CONTROL SEHINGGA MEMERLUKAN INFORMASI TENTANG BESARAN CAKUPAN DAN KUALITAS KEGIATAN PROGRAM

TYPE FUNGSI MANAJEMEN PUSAT ADALAH STRATEGI NASIONAL SEHINGGA MEMERLUKAN INFORMASI TENTANG BESARAN CAKUPAN, KUALITAS DAN DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM

RENCANA TINDAK LANJUT

PUSAT :

- **RAPAT KONSULTASI TEKNIS REGIONAL**
- **REVIEW INDIKATOR SP2TP**
- **FASILITASI DAN ASISTENSI**
- **TOT ANALISIS SISTEM DAN PENGEMBANGAN DESAIN SISTEM**
- **MONITORING DAN EVALUASI**

PROPINSI :

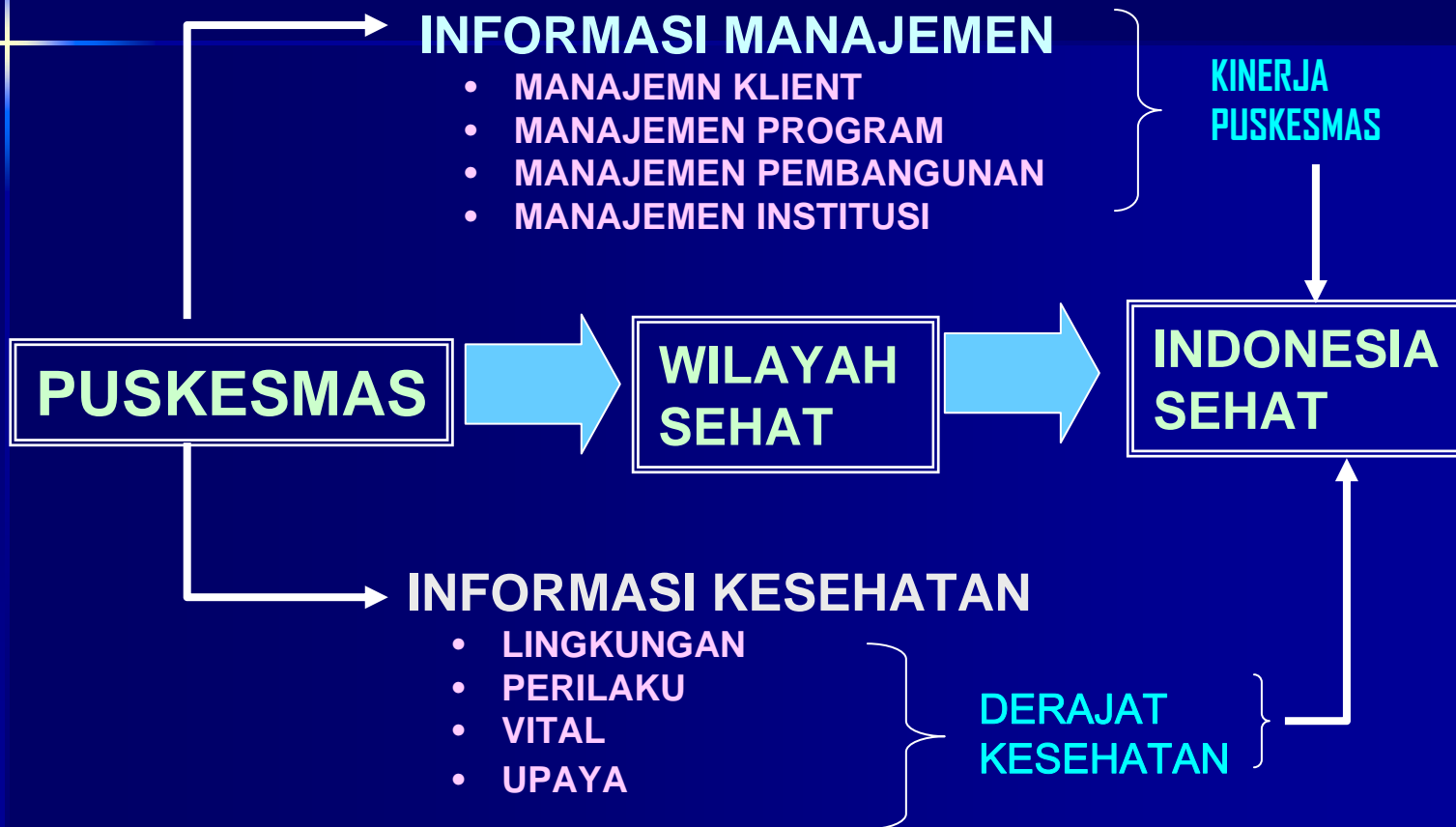
- **SEMUA PROPINSI MELAKSANAKAN RAKONTEK SISTEM INFORMASI PUSKESMAS**
- **REVIEW INDIKATOR PUSKESMAS**
- **FASILITASI DAN ASISTENSI**
- **PELATIHAN ANALISIS SISTEM**
- **MONITORING DAN EVALUASI**
- **MEMPERSIAPKAN DAN MEMBINA KABUPATEN PENGEMBANGAN**

RENCANA TINDAK LANJUT

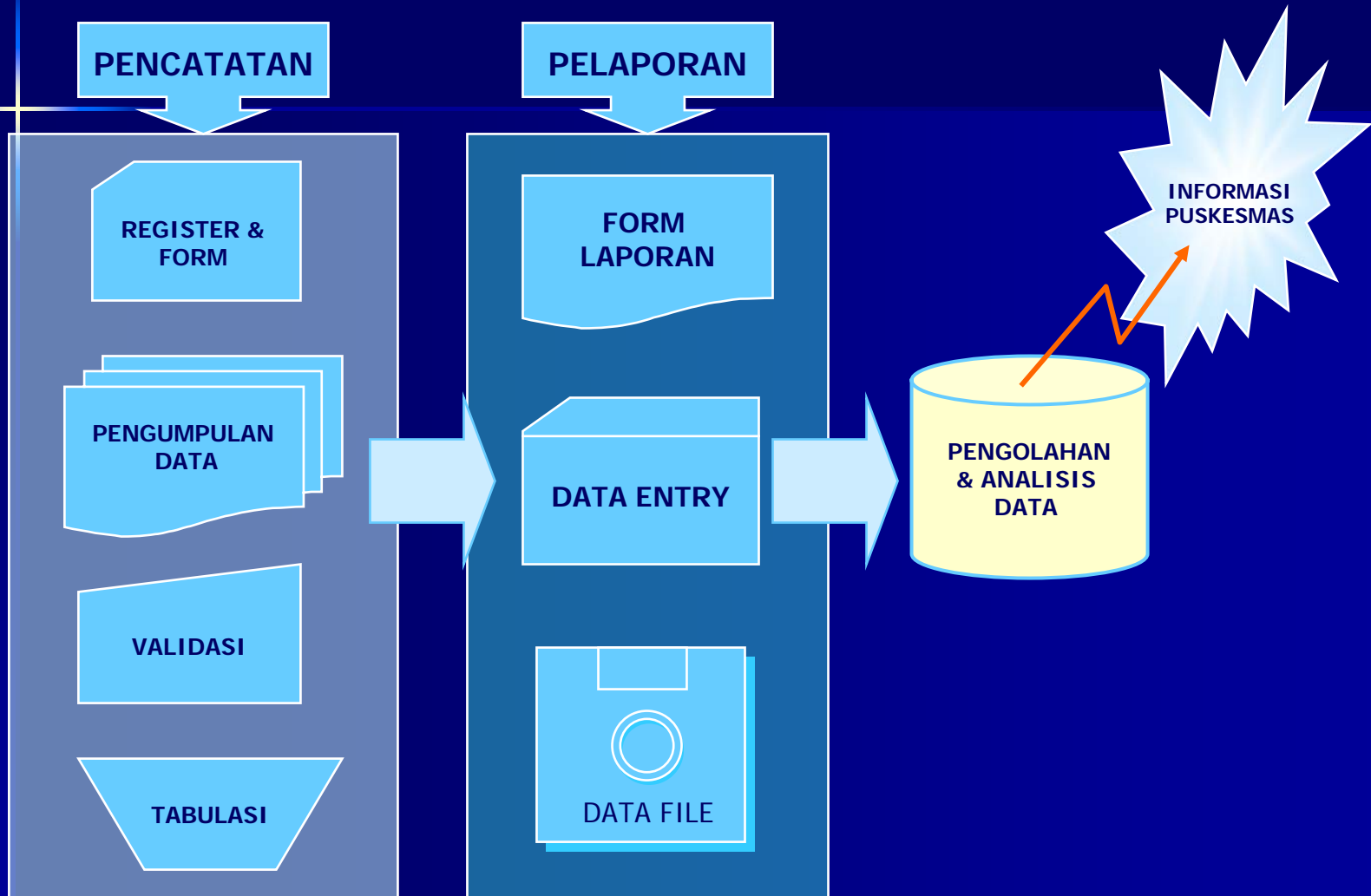
KABUPATEN / KOTA :

- **RAPAT KERJA INTERNAL DINAS KESEHATAN**
 - **ADVOKASI KEPADA STAKE HOLDER**
 - **REVIEW INDIKATOR PUSKESMAS UNTUK KAB. / KOTA**
 - **PEMBINAAN PEMANFAATAN DATA UNTUK MANAJEMEN PUSKESMAS**
 - **MEMPERSIAPKAN DAN MEMBINA PUSKESMAS PENGEMBANGAN**
-
- **SETIAP JENJANG ADMINISTRASI MELAKUKAN REVIEW KEGIATAN TAHUN 2006**
 - **ATAS DASAR HASIL REVIEW DISUSUN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK TAHUN 2007**
 - **REVIEW DILAKUKAN PADA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN**

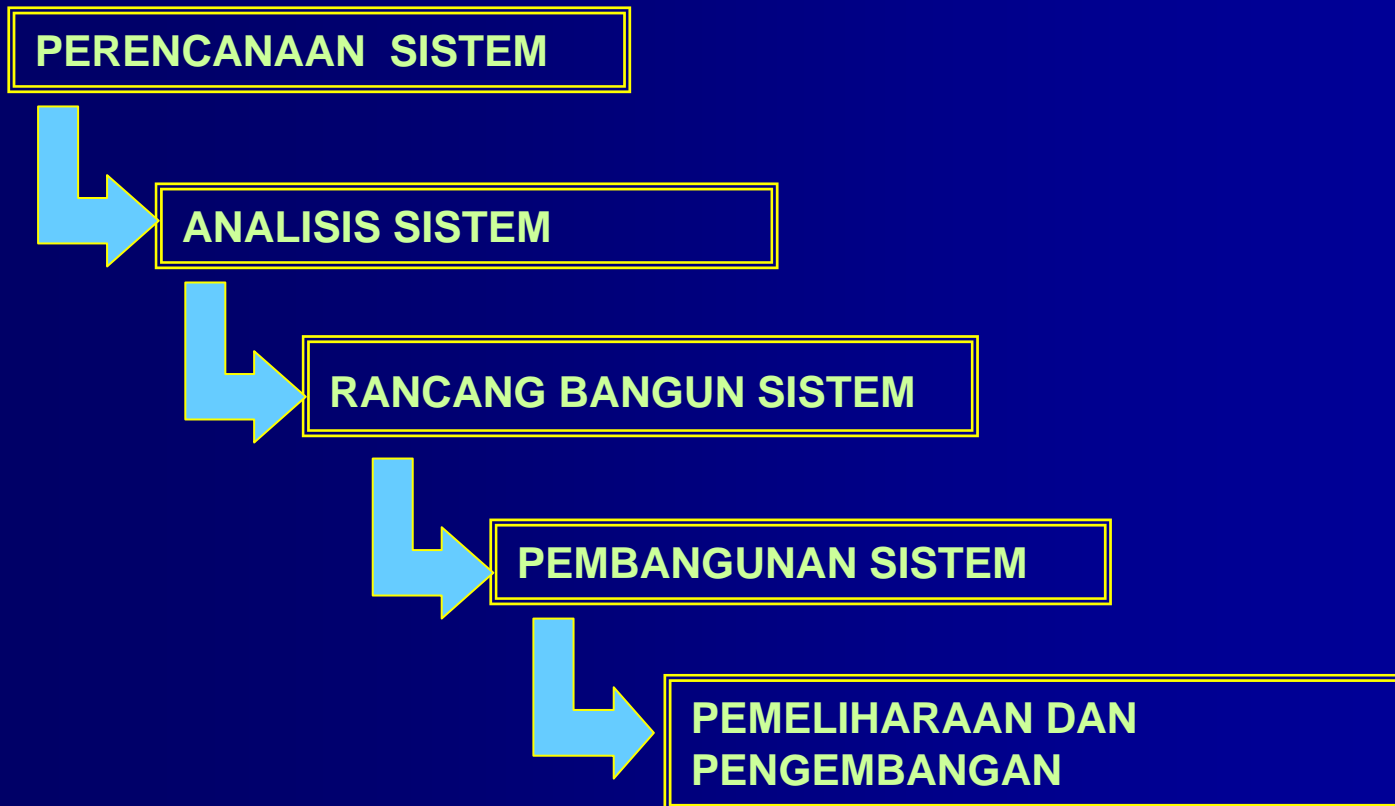
KEBUTUHAN INFORMASI



ALUR PENCATATAN DI PUSKESMAS



TAHAPAN PEMBANGUNAN SIMPUS



ANALISIS SISTEM

-
- ```
graph LR; A[ANALISIS SISTEM] --> B[REKOMENDASI SISTEM]; B --- C[• RUMUSAN DUKUNGAN POLITIS DAN KEBIJAKAN
• KEBUTUHAN INFORMASI
• REVIEW SISTEM
• KETERSEDIAAN SUMBER DAYA
• KELAYAKAN TEKNOLOGI
• KELAYAKAN PEMBIAYAAN];
```
- RUMUSAN DUKUNGAN POLITIS DAN KEBIJAKAN
  - KEBUTUHAN INFORMASI
  - REVIEW SISTEM
  - KETERSEDIAAN SUMBER DAYA
  - KELAYAKAN TEKNOLOGI
  - KELAYAKAN PEMBIAYAAN

**REKOMENDASI  
SISTEM**

# PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN



**MONITORING**

**REDESAIN SISTEM**

**RENOVASI SISTEM**